

Calon Presiden Berebut Suara Muhammadiyah

Koran TEMPO - 10 FEB '19 (1)

Warga Muhammadiyah tak perlu menunjukkan sikap politik secara gambang.

Arkhelus Wisnu

aw.triyogo@tempo.co.id

JAKARTA — Dua kubu calon presiden dan wakil presiden berebut suara warga Muhammadiyah untuk mengerek perolehan suara dalam pemilihan presiden 2019. Kedua pasangan calon presiden mengharapkan dukungan sekitar 50 juta warga Muhammadiyah untuk meningkatkan elektabilitas mereka.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan, sebagai calon inkumben, Presiden Joko Widodo memiliki peluang besar untuk merangkul semua kelompok masyarakat. Menurut dia, pembukaan sidang tanwir Muhammadiyah ke-51 di Bengkulu membuat Jokowi dapat memperkuat basis massa pemilihnya. "Namanya persepsi, kalau orang tidak kenal, maka tidak sayang. Itulah Jokowi yang selalu mencoba me-

rangkul," kata dia, kemarin.

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hamka Haq, menuturkan pertemuan langsung dengan kader Muhammadiyah bisa menguntungkan Jokowi dalam pemilihan umum. Berdasarkan pengalaman mendampingi Jokowi dalam Pemilihan Umum 2014, forum pertemuan tersebut bisa menjadi wadah calon presidennya menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta prestasi ke pemerintahannya. "Minimal itu kesempatan untuk menjawab seluruh fitnah dan hoaks. Warga Muhammadiyah mau memilih atau tidak, itu terserah mereka," ujarnya.

Hamka mengakui elektabilitas Jokowi di kalangan pemilih dari kelompok Muhammadiyah masih fluktuatif. Sebab, kata dia, Partai Amanat Nasional, yang menjadi partai pendukung pasangan Prabowo

Subianto-Sandiaga Salahuudin Uno, adalah yang paling diuntungkan dengan basis massa organisasi Muhammadiyah. "Kita tidak bisa menebak keterpilihan Jokowi. PAN itu ke Prabowo, meski sebagian tokoh Muhammadiyah ada yang ke Jokowi dan ada yang netral," ucapnya.

Hamka pun memanfaatkan Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap milik PDI Perjuangan, untuk menggaet suara dari kalangan Muhammadiyah. Dalam organisasi itu, ia melanjutkan, bukan hanya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tapi sejumlah tokoh Muhammadiyah, seperti mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif, juga turut bergabung. Para calon legislator yang berasal dari kelompok Muhammadiyah pun turun memanas mesin pemenangan PDIP. "Kami harapkan mereka bisa bergerak," tuturnya.

Kemarin, dalam acara

pembukaan sidang tanwir Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jokowi mengungkapkan kedekatannya dengan Muhammadiyah. Ia menyinggung almamater Iriana di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan kelahiran cucunya, Jan Ethes, di Rumah Sakit Muhammadiyah Solo. Menurut dia, masyarakat Indonesia harus berterima kasih kepada Muhammadiyah. Sebab, organisasi yang berdiri pada 1912 itu telah melahirkan sejumlah tokoh besar, seperti Ahmad Dahlan dan Kasman Singodimedjo. Di hadapan sekitar 500 peserta sidang tanwir, ia pun memaparkan capaian pemerintah dan menjawab sejumlah tuduhan, seperti antek asing hingga kriminalisasi ulama.

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan tidak mudah mendapatkan suara dari kalangan warga Muhammadiyah. Menurut dia, warga Muhammadiyah selalu memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas. "Mereka memiliki kecenderungan memilih yang merawat tradisi ilmu dan integritas tinggi. Mereka paham betul mana yang autentik dan mana yang tidak," kata dia. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu berujar, kehadiran dalam sidang tanwir tidak serta-merta mendorong elektabilitas Jokowi.

Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Totok Daryanto, mengatakan tak khawatir kehadiran Jokowi di ha-

"Muhammadiyah memberikan kebebasan pada anggotanya. Kebebasan ini bagus. Jadi, serahkan saja pada warga Muhammadiyah sebagai warga negara. Tapi jangan golput. Bebas menentukan pilihan, tidak digiring dan diarahkan."



TEMPO/SUBERTI

AHMAD SYAFI'I MA'ARIF, KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH PERIODE 2000-2005, SOAL SIKAP ORGANISASI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer."



TEMPO/IMANI SUKANTO

AMIEN RAIS, KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH PERIODE 1995-1998, NOVEMBER 2018.

DOK. TEMPO/PIUS ERLANGGA



"Muhammadiyah adalah ormas yang independen, terlepas dari siapa yang nantinya terpilih."

BUSYRO MUQODDAS, KETUA BIDANG HUKUM DAN HAM PP MUHAMMADIYAH, NOVEMBER LALU.

● DARI PELBAGAI SUMBER | ARKHELUS W.

dapan peserta sidang tanwir Muhammadiyah akan mengerus elektabilitas PAN dan Prabowo. Sebab, kata dia, PAN dan Muhammadiyah memiliki kedekatan kultural. "Ini yang akan dioptimalkan," ujar Wakil Ketua Umum PAN itu.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan

anggotanya tak perlu menunjukkan sikap politik secara gambang. Muhammadiyah, kata dia, adalah organisasi yang akan tetap menjalankan peran kebangsaan dengan mengutamakan silaturahmi dan komunikasi politik. "Prinsipnya, kita mengakui pemerintahan yang sah berbasis konstitusi," ucapnya.

● EGI ADYATAMA | MAYA AYU PUSPITASARI